

PERCEPATAN PEMULIHAN EKONOMI BERBASIS KOPERASI-UMKM SEBAGAI DAMPAK PANDEMI COVID-19 DI KABUPATEN BOGOR

Yusfitriadi¹

Institut Teknologi dan Bisnis Visi Nusantara Bogor
yoes_fitriadi@yahoo.com

Dahri²,

Institut Teknologi dan Bisnis Visi Nusantara Bogor
dahri@gmail.com

Rizki Riyanto³

Institut Teknologi dan Bisnis Visi Nusantara Bogor
rizkiriyanto@gmail.com

ABSTRAK

Metode kajian yang digunakan merupakan metode kajian deskriptif kualitatif. Dalam metode ini menggunakan komunitas eksplanasi. Analisis data menggunakan analisis diagram fishbone analysis da perumusan strategi dan kebijakan berbasis SWOT untuk melakukan perbandingan antara model yang diinginkan yang sudah ditentukan dengan kondisi riil atau kondisi eksisting di lapangan. Hal ini dilakukan untuk menemukan kesenjangan (gap analysis) dimana akan dihasilkan perdebatan mengenai persepsi dan pembahasan perubahan yang dianggap menguntungkan Dari hasil kajian 1) Pelaku UMKM perlu didorong untuk meningkatkan volume usahanya karena peluang pasar masih terbuka lebar. 2) Dukungan pemasaran produk melalui Kemitraan Usaha dengan Pasar Institusi dan penyediaan lokasi pemasaran bersama. Pelaku UMKM dapat mencari berbagai cara dan Teknik dalam memasarkan produknya, baik secara langsung maupun tidak langsung. 3) memprioritaskan perlindungan sosial terutama terhadap rumah tangga miskin dan rentan (PKH) serta sektor informal, perluasan Kartu Sembako, dan Kartu Pra-Kerja 4) Evaluasi intensif terhadap sasaran, kualitas, akuntabilitas, transparansi, dan efektifitas penyaluran dan pemanfaatan hibah dan bansos akan memberikan *feedback* yang signifikan bagi perbaikan pengelolaan skema hibah dan bansos 5) Penguatan UMKM dengan menumbuhkan kewirausahaan baru (*start up*), digitalisasi UMKM, fasilitasi UMKM dengan lembaga keuangan, seta melakukan penguatan industri pariwisata.

Kata Kunci: Koperasi, UMKM, Pandemi Covid-19

ABSTRACT

The study method used is a qualitative descriptive study method. In this method using explanatory community. Data analysis uses fishbone analysis diagrams and SWOT-based strategy and policy formulation to make comparisons between the desired model that has been determined and the real conditions or existing conditions in the field. This is done to find gaps (gap analysis) which will generate debate regarding perceptions and discussion of changes that are considered beneficial. From the results of the study 1) MSMEs need to be encouraged to increase their business volume because market opportunities are still wide open. 2) Product marketing support through Business Partnerships with Institutional Markets and provision of joint marketing locations. MSME actors can look for various ways and techniques in marketing their products, both directly and indirectly. 3) prioritizing social protection especially for poor

and vulnerable households (PKH) as well as the informal sector, expansion of Staple Food Cards, and Pre-Employment Cards 4) Intensive evaluation of targets, quality, accountability, transparency, and effectiveness of distribution and utilization of grants and social assistance will provide significant feedback for improving the management of grants and social assistance schemes 5) Strengthening MSMEs by cultivating new entrepreneurship (start up), digitizing MSMEs, facilitating MSMEs with financial institutions, as well as strengthening the tourism industry.

Keywords: Cooperatives, SMEs, the Covid-19 Pandemic

I PENDAHULUAN

Krisis kesehatan yang berdampak kepada ekonomi yang terjadi di seluruh dunia sejak awal 2020 masih belum berakhir sampai sekarang. Bahkan hampir tidak ada ramalan yang dapat dipercaya kapan pandemic Covid-19 tersebut akan berakhir. Pandemi ini telah merubah tatanan kehidupan dan ekonomi seluruh negara karena dampaknya yang begitu besar. Demikian halnya dengan Kabupaten Bogor, akibat pandemi Covid-19 tersebut telah menyebabkan pertumbuhan ekonomi menurun 10,54.

Turunnya perekonomian ini berdampak pada meningkatnya persentase penduduk miskin yang diprediksikan sebesar 2,48 persen menjadi 9,14 persen di akhir tahun 2020. Tak hanya itu, tingkat pengangguran terbuka juga diprediksi meningkat sebesar 3,77 persen di akhir tahun 2020. Penyebab kondisi ini adalah mewabanya pandemic Covid-19.

Adanya guncangan Covid-19 ini merupakan permasalahan besar yang mengganggu perekonomian Kabupaten Bogor. Agar permasalahan ini terakomodir dalam perencanaan daerah, maka beberapa dokumen perencanaan daerahpun perlu dilakukan perubahan. Seperti perubahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)

Kabupaten Bogor Tahun 2018-2023 akan difokuskan pada pemulihan ekonomi imbas pandemi COVID-19.

Pandemi memberikan efek domino pada perekonomian Kabupaten Bogor, seperti menurunnya laju pertumbuhan ekonomi 1,19 persen yang berimbas pada meningkatnya angka kemiskinan 7,69 persen dan meningkatnya angka pengangguran sebesar 14,29 persen. Kemudian muncul permasalahan sosial dampak dari pandemi ini yang tentunya menjadi tantangan besar bagi pemerintah daerah melakukan perubahan-perubahan dan capaian target dalam RPJMD nya. Maka peningkatan porsi anggaran untuk upaya pemulihan ekonomi perlu dilakukan sebagai ikhtiar menangani dampak pandemi. Recovery ekonomi penting untuk melakukan percepatan-percepatan.

Sebuah studi menyebut jika Covid-19 membuat Indonesia mengalami penurunan persentase pertumbuhan ekonomi sebesar 0.1% di tahun 2020. Pada tataran ekonomi global, pandemi COVID-19 memberikan dampak yang signifikan terhadap perekonomian domestik negara-bangsa dan keberadaan KOPERASI DAN UMKM. Tidak hanya industri besar, pandemi telah membuat pelaku UMKM di Indonesia mulai gelisah. Sampai dengan 17

April 2020, sebanyak 37.000 pelaku UMKM melaporkan diri kepada Kementerian Koperasi dan UKM terdampak pandemi COVID-19 (Laila, 2021).

Dalam situasi pandemi ini, menurut Kemenkop UKM terdapat kurang lebih sekitar 37 ribu UMKM yang mengajukan laporan jika mereka terkena efek serius dari dampak COVID-19. Efek serius itu ditandai sekitar 56% juga mengalami penurunan hasil penjualan, 22% terkait problem pembayaran dari aspek pembiayaan, 15% lainnya juga melaporkan bahwa hanya terkait masalah distribusi barang serta yang terakhir adalah 4 persen melaporkan kesulitan mendapatkan bahan baku mentah. (Bahtiar & Saragih, 2020)

Laporan *Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)* menyebutkan pandemi ini berimplikasi pada ancaman krisis ekonomi yang cukup besar yang ditandai dengan berhentinya aktivitas produksi di berbagai negara, jatuhnya tingkat konsumsi masyarakat, hilangnya kepercayaan konsumen, jatuhnya bursa saham yang pada akhirnya mengarah pada ketidakpastian. Penelitian Pakpahan (2021) menyebutkan ada tiga implikasi terbesar bagi Indonesia terkait pandemi COVID-19 ini yakni sektor pariwisata, perdagangan, dan investasi. Indonesia yang didominasi oleh keberadaan UMKM sebagai tulang punggung perekonomian nasional juga terdampak secara serius tidak saja pada aspek total produksi dan nilai perdagangan akan tetapi juga terhadap jumlah tenaga kerja yang harus kehilangan pekerjaannya karena pandemi ini.

Lesunya sektor pariwisata memiliki efek domino terhadap sektor UMKM. Berdasarkan data yang diolah P2E LIPI, dampak penurunan pariwisata terhadap UMKM yang bergerak dalam usaha makanan dan minuman mikro mencapai 27%. Sedangkan dampak terhadap usaha kecil makanan dan minuman sebesar 1,77%, dan usaha menengah di angka 0,07%. Pengaruh virus Covid-19 terhadap unit kerajinan dari kayu dan rotan, usaha mikro akan berada di angka 17,03%. Untuk usaha kecil di sektor kerajinan kayu dan rotan 1,77% dan usaha menengah 0,01%. Sementara itu, konsumsi rumah tangga juga akan terkoreksi antara 0,5% hingga 0,8% (katadata.co.id, 2 Maret 2020). Padahal UMKM memiliki peran yang sangat strategis dalam perekonomian Indonesia. Data Kementerian Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah Indonesia tahun 2018 menunjukkan jumlah unit usaha UMKM 99,9% dari total unit usaha atau 62,9 juta unit. UMKM menyerap 97% dari total penyerapan tenaga kerja, 89% di antaranya ada di sektor mikro, dan menyumbang 60% terhadap produk domestik bruto (Kemenkop dan UMKM, 2018).

Berdasarkan uraian di atas, maka Pemerintah Kabupaten Bogor perlu memperhatikan kondisi Covid-19 ini dalam menyusun rencana kegiatan pembangunan daerahnya (RKPD). Pemerintah Kabupaten Bogor telah menyusun Rencana Program RKPD 2022 sebagai acuan kerja semua SKPD dan Kecamatan dalam melaksanakan berbagai kegiatan di tahun depan. Rencana kerja ini perlu memperhatikan berbagai hal agar tujuan akhirnya tidak terlalu melenceng dari rencana yang

disusun serta terwujud konsistensi antara kebijakan dengan pelaksanaan dan hasil rencana pembangunan daerah. Konsistensi antar dokumen perencanaan dan penganggaran penting diperhatikan karena merupakan indikator dalam menilai kinerja pemerintah daerah. Adapun program-program yang menjadi prioritas nasional dan provinsi tetap menjadi perhatian dalam rangka perwujudan sinergitas pembangunan sektoral maupun kewilayahan

Dari upaya-upaya yang telah dilakukan pemerintah, terlihat masih banyak terpusat pada sektor pariwisata yang memiliki pengaruh besar pada sektor UMKM, selain itu kelonggaran kredit juga dianggap sudah tepat untuk meringankan beban UMKM. Namun, bantuan/insentif kepada UMKM khususnya usaha mikro dan kecil masih perlu diperhatikan apalagi mengingat himbauan *social distancing* saat ini yang berpengaruh besar pada usaha kecil dan mikro yang masih banyak membutuhkan tatap muka.

II METODELOGI KAJIAN

Metode kajian yang digunakan merupakan metode kajian deskriptif kualitatif. Dalam metode ini menggunakan komunitas eksplanasi, yaitu proses pencarian pengetahuan dan pemahaman yang benar tentang berbagai aspek pemulihan ekonomi melalui sector UMKM sebagai dampak pandemi covid 19 yang berada di Kabupaten Bogor dengan ulasan dipertajam menggunakan Analisis SWOT. Pendekatan yang digunakan dalam kajian ini ialah

subyektif-mikro, yaitu upaya memahami sikap, pola perilaku, dan upaya pemulihan ekonomi sector UMKM yang terdampak pandemi covid 19 dengan menggunakan strategi studi kasus-kasus umum. Lokasi kajian ini berada di Kabupaten Bogor yang terdiri dari 413 desa dan 17 kelurahan (430 desa/kelurahan), 3.768 RW dan 14.951 RT yang tercakup dalam 40 kecamatan.

Data yang digunakan untuk mendukung kajian ini terutama data sekunder. Data sekunder tersebut berasal dari Pemerintah Kabupaten Bogor, BPS, serta berbagai terbitan publikasi terkait penanganan covid-19 dan pemulihan ekonomi berbagai pihak di berbagai wilayah. Disamping itu berbagai info yang bersumber dari pihak Bapedalitbang Kabupaten Bogor serta pengamatan lapang digunakan untuk memperkaya tulisan ini.

Teknik yang dipergunakan untuk mengumpulkan data di atas, dilakukan dengan cara: 1) Wawancara. 2) Observasi Langsung. 3) Diskusi Kelompok. Merupakan metode pengumpulan data yang biasa terbuka, meluas dan tidak terkontrol. 4) Focused Group Discussion (FGD) dilakukan satu kali dengan Kepala Dinas di Lingkungan Kabupaten Bogor, para camat, tokoh formal masyarakat seperti Camat Kepala Desa, Lurah, Ketua Badan Perwakilan Desa (BPD), Ketua Lembaga Pemberdayaan Masyarakat (LPM), pedagang dan lain-lain. 5) Studi Dokumentasi/ Studi Arsip Studi dokumentasi, dilakukan dengan menelaah beberapa laporan, buku, arsip, dan catatan tentang pemulihan ekonomi di Kabupaten Bogor seperti

Rancangan Rencana Kerja Tahun 2021 dari berbagai dinas terkait, program kerja pemerintah daerah Kabupaten Bogor.

Data yang terkumpul, dikerjakan dan dimanfaatkan sedemikian rupa untuk menjawab persoalan-persoalan yang diajukan dalam kajian lapangan. Data yang ada tersebut diolah dan dianalisis dengan menggunakan tabulasi data, sedangkan teknik menganalisisnya adalah dengan menggunakan analisa data kualitatif yang meliputi kualitatif meliputi: 1) Reduksi Data. 2) Penyajian Data. 3) Kesimpulan.

Analisis data yang digunakan pada kajian ini terdiri dari 4 (empat) tahapan. Tahap pertama adalah identifikasi kondisi eksisting di lapangan. Hal ini dilakukan untuk mengetahui kondisi riil yang terjadi di lapangan. Tahap kedua adalah mencari sumber permasalahan yang menjadi penghambat pemulihan perekonomian masyarakat Kabupaten Bogor Pada masa Covid-19. Pada Tahap ini dilakukan dengan menggunakan analisis diagram fishbone analysis. Tahap ketiga adalah melakukan analisis kesenjangan (gap analysis) antara kondisi saat ini dengan kondisi ideal atau seharusnya pada aspek-aspek yang masih menjadi penghambat atau masalah utama. Selanjutnya pada tahap keempat dilakukan perumusan strategi dan kebijakan berbasis SWOT. Setiap tahapan analisis dijelaskan sebagai berikut: Pertama, Analisis kondisi/situasi dan permasalahan pemulihan perekonomian masyarakat Kabupaten Bogor Pada masa Covid 19. Analisis status digunakan untuk melihat kondisi dengan Poin-poin yang dilakukan meliputi: (1) kinerja,

isu dan permasalahan sektor ekonomi; (2) kinerja, isu dan permasalahan sektor ekonomi; (3) kinerja, isu dan permasalahan masyarakat dan (4) kinerja, isu dan permasalahan sektor kelembagaan dan pemerintah daerah Kabupaten Bogor.

Penelusuran sumber masalah menggunakan *Fishbone Analysis* Tahap kedua adalah penyusunan definisi permasalahan. Akar permasalahan akan dirunut secara terperinci dengan mencakup pandangan tertentu terhadap situasi masalah sesuai dengan perspektif yang relevan. Dalam tahap ini digunakan untuk menganalisis beberapa kondisi sebagai berikut : 1) untuk mengenal penyebab yang penting 2) untuk memahami semua akibat dan penyebab 3) untuk membandingkan prosedur kerja, 4) untuk menemukan pemecahan yang tepat 5) untuk memecahkan hal apa yang harus dilakukan 6) untuk mengembangkan proses. Ketiga Analisis Perbandingan Model dengan Kondisi Riil (Gap Analysis) Selanjutnya dilakukan perbandingan antara model yang diinginkan yang sudah ditentukan dengan kondisi riil atau kondisi eksisting di lapangan. Hal ini dilakukan untuk menemukan kesenjangan (gap analysis) dimana akan dihasilkan perdebatan mengenai persepsi dan pembahasan perubahan yang dianggap menguntungkan. Untuk membandingkan model dengan kondisi riil

III HASIL DAN PEMBAHASAN

Secara geografis Kabupaten Bogor terletak diantara 6°18"0" – 6°47"10" Lintang Selatan dan 106°23"45" – 107°13"30" Bujur Timur, yang berdekatan dengan Ibukota Negara sebagai pusat pemerintahan, jasa dan perdagangan dengan aktifitas pembangunan yang cukup tinggi dan merupakan daerah perlintasan antara Ibukota Negara dan Ibukota Provinsi Jawa Barat.

Secara administratif, Kabupaten Bogor mempunyai luas 266.383 Ha yang terdiri dari 40 kecamatan yang di dalamnya meliputi 417 desa dan 17 kelurahan. Pada tahun 2012 telah dibentuk 4 (empat) desa baru, yaitu Desa Pasir Angin Kecamatan Megamendung, Desa Urug, dan Desa Jayaraharja Kecamatan Sukajaya serta Desa Mekarjaya Kecamatan Rumpin. Berikut Peta administrasi Kabupaten Bogor

Jumlah penduduk Kabupaten Bogor pada tahun 2019 berdasarkan hasil estimasi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor mencapai 5.965.410 jiwa. dengan komposisi, lak-laki 3.045.174 jiwa dan perempuan 2.920.236 jiwa. Pada tahun 2020 penduduk Kabupaten Bogor mencapai 6,088. Pada tahun 2021 ini akan terus naik sesuai dengan tren pertumbuhan jumlah penduduk di Kabupaten Bogor dari tahun ke tahun berkisar di angka 2 persen. Melihat jumlah penduduk Kabupaten Bogor maka akan menjadi kabupaten dengan jumlah penduduk terbanyak di Indonesia. Jumlah penduduk terbanyak berada di Kecamatan Gunung Putri (388.766 jiwa) dan jumlah terkecil terdapat di Kecamatan Cariu (46.474 jiwa).

Kepadatan penduduk tertinggi adalah di Kecamatan Ciomas dengan kepadatan mencapai 100 jiwa/Ha, sedangkan kepadatan terendah ada pada Kecamatan Tanjungsari yang mencapai 4 jiwa/Ha. Akan tetapi Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bogor, Jawa Barat, mencatat adanya pengurangan jumlah penduduk sekitar 500 ribu jiwa akibat pandemi Covid-19 baik karena factor kematian ataupun yang berpindah ke luar Bogor. Hal ini dikarenakan pengurangan pekerja atau PHK di berbagai sektor, terlebih di industri, industri, perhotelan, dan pusat-pusat perdagangan.

Wilayah Kabupaten Bogor memiliki sumberdaya alam yang cukup besar. Beberapa potensi yang ada, antara lain pertanian, pariwisata dan pertambangan. Khusus mengenai pertanian, maka potensi sector ini memiliki luas lahan 39.000 Ha atau 13,06 % dari luas Kabupaten Bogor. Selain potensi produksi tanaman pangan, produksi tanaman perkebunan dan produksi perikanan air tawar dan peternakan, dapat dilihat dari luasan sawah produktif, perkebunan dan kawasan perikanan. Pemerintah Kabupaten Bogor sangat memperhatikan pengembangan pertanian dan pembangunan perdesaan pada khususnya melalui kebijakan Revitalisasi Pertanian dan Pembangunan Perdesaan (RP3) yang telah diatur dalam Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2009 sebagaimana telah dirubah dengan Peraturan Bupati Nomor 38 Tahun 2014 tentang *Revitalisasi* Pertanian. Berdasarkan peraturan ini pengembangan pertanian dan pembangunan perdesaan di

Kabupaten Bogor dibagi dalam beberapa Zona.

Berdasarkan Perda No 11 Tahun 2016 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Bogor, disebutkan bahwa Wilayah Kabupaten Bogor dibagi menjadi tiga Wilayah Pengembangan (WP), yaitu Wilayah Pengembangan Barat, Wilayah Pengembangan Tengah dan Wilayah Pengembangan Timur. Wilayah pengembangan adalah kesatuan kelompok wilayah administratif kecamatan yang memiliki kesamaan karakteristik fisik dan fungsi yang diarahkan pengembangannya secara terintegrasi.

Masing-masing wilayah tersebut memiliki arahan fungsi pemanfaatan yang berbeda satu sama lain. Berdasarkan potensi pengembangan wilayah dalam RJPMD tahun 2018-2023 diketahui bahwa potensi wilayah Kabupaten Bogor terbagi dalam beberapa zonasi sesuai arah pengembangan, antara lain: (1) Agrosilvopastoral, yaitu pengembangan agroforestry yang didukung oleh sektor pertanian tanaman pangan dan peternakan, (2) Agroekowisata yang didukung oleh sektor pertanian tanaman pangan dan perikanan. Pola pengembangan komoditas strategis: agropolitan dan minapolitan, (3) Industri non-farm yang didukung dengan sektor pertanian, perikanan, kehutanan, dan peternakan, (4) Industri perdesaan dan pengembangan UMKM, yang tetap berbasiskan pada produk atau komoditas pertanian secara luas serta perikanan berbasis minapolitan, (5) Diversifikasi pertanian dan agroekowisata, (6) Ekowisata yang dikerjasamakan

dengan berbagai pihak dalam rangka membuka lapangan pekerjaan bagi masyarakat (7) Pertanian perkotaan dan industri. Pengembangan *urban agriculture* bertitik tolak pada produk atau komoditas pertanian yang sudah diusahakan oleh warga. Pengembangan industri besar dikaitkan dengan ada rencana pengembangan Cibinong Raya dan (8) Lumbung pangan melalui peningkatan dan rehabilitasi sarana dan prasarana pemukiman (RPJMD, 2018-2023).

Kabupaten Bogor merupakan salah satu Kabupaten di Jawa Barat yang memiliki tingkat pertumbuhan ekonomi yang relatif tinggi di antara wilayah yang lain. Angka pertumbuhan ekonomi (LPE) Kabupaten Bogor tahun 2019 mencapai 5,85%, sedangkan rata-rata pertumbuhan ekonomi Jawa Barat adalah 5,07%. Hal ini menunjukkan tingkat pertumbuhan ekonomi Kabupaten Bogor diatas rata-rata pertumbuhan ekonomi Kabupaten dan Kota yang berada di Propinsi Jawa Barat. Ini membuktikan bahwa kegiatan perekonomian di wilayah Kabupaten Bogor lebih tinggi dibandingkan dengan rata-rata di daerah Jawa Barat. Dilihat dari rata-rata pengeluaran per kapita per bulan makanan dan non makanan Kabupaten Bogor mencapai 1.270.506 per kapita, sedangkan rata-rata Jawa Barat adalah 1.218.079 per kapita per bulan (BPS Jawa Barat, 2020). Hal ini menunjukkan bahwa rata-rata pengeluaran penduduk Kabupaten Bogor lebih tinggi dibandingkan rata-rata pengeluaran penduduk wilayah Propinsi Jawa Barat.

Memasuki tahun 2020 hampir semua indikator makro ekonomi Kabupaten Bogor mengalami penurunan. Hal ini dikarenakan dampak pandemic Covid-19 yang mulai masuk per bulan Maret 2020. Berdasarkan laporan BPS tahun 2021, bahwa PDRB Kabupaten Bogor atas dasar harga berlaku tahun 2020 mencapai Rp. 236.146,66 milyar dan atas dasar harga konstan mencapai Rp. 154.096,81 milyar. Hal ini menunjukkan adanya kontraksi sebesar 1,77 persen dari PDRB tahun 2019. Terkontraksinya pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Bogor pada tahun 2020 dibanding tahun 2019 akibat penurunan produksi hampir disemua lapangan usaha sebagai dampak dari pandemi Covid-19. Dari sisi produksi, kontraksi ekonomi tertinggi terjadi pada lapangan usaha Jasa Perusahaan turun sebesar 10,90%. Dari sisi pengeluaran, kontraksi ekonomi tertinggi terjadi pada komponen perubahan inventori, yaitu sebesar 60,74% (BPS Kabupaten Bogor 2021).

Selama lima tahun 2016 sampai tahun 2020, struktur perekonomian Kabupaten Bogor didominasi oleh 5 (lima) lapangan usaha, yaitu: (1) Industri Pengolahan, (2) Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor, (3) Konstruksi, (4) Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan serta (5) Transportasi dan Pergudangan. Kondisi tersebut dapat dilihat dari peranan masing-masing lapangan usaha terhadap pembentukan PDRB Kabupaten Bogor selama 5 tahun terakhir. Peranan terbesar dalam pembentukan PDRB Kabupaten Bogor pada tahun 2020 dihasilkan

oleh lapangan usaha Industri Pengolahan berkontribusi 53,67% terhadap total distribusi walaupun secara pertumbuhan mengalami kontraksi -2,53%. Selanjutnya disusul oleh lapangan usaha Perdagangan Besar dan Eceran, Reparasi Mobil, dan Sepeda Motor berkontribusi terhadap distribusi total sebesar 12,06%, walaupun angka pertumbuhan -4,32%, selanjutnya lapangan usaha Konstruksi berkontribusi sebesar 9,93% terhadap total distribusi, dengan pertumbuhan -5,25%, lapangan usaha Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan berkontribusi sebesar 5,39%, dengan pertumbuhan yang positif yaitu 0,80%, selanjutnya lapangan usaha Transportasi dan Pergudangan berkontribusi sebesar 3,90% dengan angka pertumbuhan -1,3%. Sedangkan peranan lapangan usaha-lainnya masing-masing masih berada di bawah 3% (BPS Kabupaten Bogor 2021).

PDRB per kapita merupakan salah satu indikator untuk melihat perkembangan pemerataan suatu wilayah. Series data PDRB per kapita memberi gambaran rata-rata kemampuan setiap penduduk Kabupaten Bogor dalam menciptakan PDRB dari tahun ke tahun. Tahun 2020 baik harga konstan maupun berlaku, PDRB Per kapita terdampak pandemi Covid-19. Tahun 2019 PDRB per kapita penduduk Kabupate Bogor sebesar 39,77 juta rupiah, dan tahun 2020 mengalami penurunan menjadi 38,79 juta rupiah atau terkontraksi 0,98 point. PDRB per kapita dipengaruhi oleh besaran PDRB

secara keseluruhan. Pada tahun 2020 PDRB Kabupaten Bogor mengalami penurunan, hal berakibat pada turunnya nilai PDRB per kapita, yang tercermin pada laju pertumbuhan PDRB perkapita tahun 2020 yang sebesar -3,75%. Meskipun jika kita melihat laju pertumbuhan penduduk di tahun 2020 ini juga mengalami perlambatan dibandingkan dengan tahun tahun sebelumnya yaitu 2,06% (BPS Kabupaten Bogor, 2021).

Langkah Awal Penanganan Covid-19 dilakukan dengan 1) Program Bantuan Langsung Tunai (BLT) untuk UMKM. 2) Restrukturisasi pinjaman/pembiayaan kepada mitra penerima dana bergulir program pembiayaan KemenKopUKM. 3) Pemasaran digital. Strategi yang dilakukan Pemerintah Kabupaten Bogor dalam pemberian stimulus kepada UMKM dan koperasi, yaitu: Pertama. Penumbuhan Wirausaha Baru. Penumbuhan Wirausaha Baru pada Tahun 2020 ditargetkan untuk pertumbuhannya sebesar 160 orang, yang akan dilatih dan magang pada sentra-sentra UMKM yang sudah berkembang dan berjalan dengan baik dibagi dalam 4 Angkatan dengan pembukaan pendaftaran dimulai dari Angkatan I tanggal 17 s/d 20 Februari 2020, Angkatan II tanggal 24 s/d 27 Februari 2020, Angkatan III tanggal 9 s/d 12 Maret 2020, Angkatan IV tanggal 16 s/d 19 September 2020.

Kedua.

Pembentukan Kampung/Desa Wirausaha. Kampung Wirausaha pada Tahun 2020 dibentuk di 3 Kecamatan yaitu: Kelurahan Padasuka Kec Ciomas, Desa Tegal

Kec Kemang dan Desa Benteng Kec Ciampea. SK Kepala Dinas No.518.3/110.A /Kpts /PUM/ XIII/ 2020, dan kepada desa-desa tersebut diberikan bantuan alat kerja untuk 100 UMKM di masing-masing desa, kecuali untuk desa di Kec Ciampea di rencanakan akan diberikan tahun akan datang. Untuk menambah lokasi Kp.wirausaha baru akan dibuat kajian berupa pembentukan kampung wirausaha, dan diharapkan Tahun 2021, sudah bisa ditetapkan kampung wirausaha baru lagi.

Ketiaga Pemberian Bantuan Presiden selama Pandemi Covid-19 untuk para UMKM. Dalam membantu program bantuan Pemerintah Pusat melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah (UKM) memberikan Bantuan Presiden Usaha Mikro (BPUM) merupakan Banpres Produktif untuk para pelaku UKM sebagai strategi pemerintah dalam membantu pelaku UKM agar tetap dapat bertahan di tengah pandemi Covid-19. Bantuan Presiden ini dibagi menjadi 2 tahapan mulai dari tahap pertama yang dimulai pada tanggal 18 Agustus-12 September 2020, dan tahap kedua dimulai pada tanggal 12 Oktober – 25 November 2020. Dengan data yang terkumpul di Dinas Koperasi UKM mencapai 28.989 pelaku Usaha Kecil Mikro (Tahap 1) dan 300.390 pelaku Usaha Kecil Mikro (Tahap 2) dari target pemerintah sebesar 15 ribu pelaku UKM dengan total anggaran sebesar Rp 22.Milyar yang bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara. Para pelaku usaha dapat mengajukan bantuan melalui Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah. Dari berkas yang telah dilampirkan para pelaku UKM tersebut di input secara *online* di bit.ly/BIODATAUKM oleh

petugas yang membantu proses penginputan, selain dapat dibantu penginputannya para pelaku UKM juga bisa melakukan penginputan secara mandiri lalu mengirimkan berkasnya yang sudah diinput ke Dinas Koperasi UKM.

Keempat. Pengembangan Koperasi Syariah di Kab Bogor
Pengembangan Koperasi Syariah di Kab Bogor pada Tahun 2020, kegiatan ini dilaksanakan karena prospek Syariah di Indonesia semakin berkembang dan menjanjikan, oleh sebab itu koperasi di Kab Bogor di dorong untuk menuju pola syariah. Hal ini didukung oleh beberapa kegiatan diantaranya: Penyuluhan koperasi syariah, Revitalisasi dan penguatan kelembagaan koperasi syariah, Penyuluhan, sosialisasi dan konsolidasi pengembangan koperasi syariah, Penyiapan dewan pengawas syariah (DPS).

Kelima. Promosi UMKM melalui kegiatan penyewaan ruko atau toko

Untuk pengembangan usaha mikro di Kab Bogor pada Tahun 2020 telah dilaksanakan kegiatan penyediaan sarana dan prasarana berupa penyewaan ruko atau toko. Kegiatan ini dilaksanakan di 29 Kecamatan dengan memberikan sewa secara Cuma-Cuma kepada pelaku usaha dan bantuan alat kerja/Usaha yang mendukung kesiapan toko atau ruko. Kegiatan ini bertujuan untuk membantu para pelaku usaha yang terdampak Covid-19 di Kab Bogor, agar mereka dapat bertahan usahanya di masa Pandemi Covid-19.

Keenam Pemeriksaan dan Pengawasan Koperasi di Kab Bogor.

Penilaian Kesehatan Koperasi di Kab Bogor pada Tahun 2020 terdiri dari 5 sub kegiatan yaitu: Kegiatan Pemeriksaan KSP/KSPPS, Kegiatan Pemeriksaan kelembagaan koperasi, Pengawasan kepatuhan koperasi, Penilaian kesehatan KSP / KSPPS dan Monitoring Hasil Pengawasan Koperasi. Kegiatan ini digelar agar koperasi yang ada di Kab Bogor bisa lebih sehat.

Dinas Koperasi Usaha Kecil Menengah Kab Bogor mengingatkan para pengelola koperasi dan pelaku usaha untuk tidak menjadikan tren revolusi industri 4.0 sebagai beban. Sebaliknya, koperasi harus memanfaatkan tren digitalisasi untuk tetap dapat eksis. Koperasi dan Usaha Mikro harus mampu melakukan perubahan, revolusi, dan transformasi menjadi organisasi yang efisien, profesional, dan fokus membangun bisnisnya. Koperasi dan UMKM di Kab Bogor saat ini juga harus memiliki kemampuan menangkap peluang usaha yang ada di masyarakat. Intinya, koperasi dan Usaha Mikro harus sudah berbasis teknologi.

Pada situasi pandemi saat ini cukup memberikan tantangan yang berat sekaligus menjadi awal peluang bagi pemerintah dalam memunculkan eksistensi wirausaha UMKM baru, diartikan perlu adanya solusi jangka pendek untuk membantu UMKM dan pekerja yang tergabung didalamnya. Serta solusi jangka panjang, apalagi jika dikaitkan dengan era industri 4.0 yang mensyaratkan ketersediaan teknologi digital untuk mendukung aktifitas ekonomi. Ada beberapa solusi jangka pendek untuk tetap

menjaga eksistensi UMKM. Menurut OECD, beberapa solusi perlu dipertimbangkan untuk dilakukan yakni:

Pertama, pemberlakuan protokol kesehatan ketat dalam menjalankan aktifitas ekonomi UMKM, seperti penggunaan masker pada saat beraktivitas di luar rumah, memakai sarung tangan, dan jaga jarak (social distancing) dapat dilakukan untuk meminimalisir penyebaran virus Covid-19. Hal ini juga memerlukan kerjasama dan pengawasan dari instansi terkait yang berwenang terhadap pelaksanaan protokol Covid-19 agar bisa berjalan dengan baik.

Kedua, pemerintah melakukan kebijakan struktural seperti, memberikan relaksasi kredit bagi pelaku UMKM sebagai bentuk bantuan penundaan pembayaran kredit atau keringanan pembayaran. Selain itu, dalam proses menyederhanakan administrasi untuk mendapatkan pinjaman pada musim pandemi saat ini. Hal ini mampu untuk dilaksanakan oleh para pelaku UMKM karena hal ini bertujuan agar para pelaku UMKM khususnya para pekerja tetap mampu tetap mempertahankan tingkat konsumsi serta daya belinya dan mendukung berjalannya roda perekonomian nasional.

Ketiga, bantuan kepada para pelaku UMKM. Pemerintah telah menyediakan beberapa anggaran sebesar kurang lebih 70,1 triliun untuk intensif sebagai dana perpajakan dan sebagai stimulus untuk perkreditan rakyat dari total anggaran yang sudah disediakan senilai 405,1 triliun guna untuk mengatasi pandemi Covid-19 melalui APBN 2020. Pelaksanaan anggaran

tersebut harus dilaksanakan dengan transparan jelas serta tepat sasaran agar eksistensi usaha mikro kecil menengah serta beberapa aktivitas perekonomian tetap mampu terjaga. Selain anggaran yang telah ditetapkan pemerintah juga menggandeng atau mendorong beberapa sektor-sektor diantaranya sektor perbankan baik itu bank milik negara maupun milik swasta. Agar dapat memberikan bantuan berupa pinjaman untuk beberapa pelaku UMKM dengan sedikit memberikan kemudahan dalam proses peminjaman. Maka dari itu, pemerintah mengajak beberapa bank agar tetap terhadap mekanisme peminjaman tapi juga harus memberikan kompensasi yang tidak memberatkan kepada beberapa peminjam yang peminjamnya tersebut adalah para pelaku UMKM. Hal ini bertujuan agar tidak ada penyalahgunaan kebijakan yang akan merugikan salah satu pihak nantinya.

Keempat, untuk kebijakan pada jangka panjang tidak hanya pada saat pandemi Covid-19. Kebijakan ini meliputi kebijakan-kebijakan jangka pendek bagi UMKM yakni pengenalan teknologi digital dan pelatihan bagi para pelaku dan pekerja UMKM serta kebijakan jangka panjang bagi UMKM untuk beradaptasi dengan penggunaan teknologi untuk proses produksi, penggunaan media teknologi digital untuk mempromosikan produk UMKM, dan menemukan pasar potensial bagi produk yang dihasilkan. Dalam jangka pendek, perlu adanya pendampingan bagi para pelaku UMKM untuk dapat memanfaatkan media e-commerce (belanja daring) untuk menjual

produk-produk mereka. Data dari Badan Pusat Statistik menunjukkan bahwa pada tahun 2018 baru 3,79 juta UMKM (atau sekitar 8 persen) yang memanfaatkan platform online untuk memasarkan produknya. (Sugiri, 2020)

Banyak negara telah mengenalkan atau mengadopsi program bauran untuk menyelamatkan sektor usaha kecil dan menengah atau UMKM (OECD, 2020). Pertama, memberikan subsidi gaji kepada UMKM yang tidak mampu membayar gaji pegawainya. Kedua, mendorong pengembangan inovasi wiraswasta agar dapat menyerap tenaga kerja yang menganggur. Ketiga, memberikan penangguhan penyelesaian kewajiban atau utang UMKM baik untuk kewajiban perpajakan maupun kewajiban pinjaman usaha. Keempat, memberikan pinjaman secara langsung kepada pelaku UMKM agar dapat memiliki modal yang cukup untuk mempertahankan bisnis. Kelima, mendorong digitalisasi usaha UMKM agar dapat tetap beroperasi dalam kondisi terdapat pembatasan pergerakan masyarakat. Tabel 9 menyajikan ringkasan penanganan COVID-19 pada beberapa negara. Instrumen fiskal seperti penangguhan pajak penghasilan (PPh) masih menjadi pilihan umum yang digunakan oleh banyak negara dalam mengatasi pandemi Covid-19 (Sugiri, 2020).

Intervensi melalui subsidi upah (wage subsidy) untuk sektor UMKM dilakukan oleh beberapa negara seperti China, Perancis, Jepang, Serbia, Thailand dan Venezuela sebagaimana yang ditulis Gentilini et

al. (2020). Pada Tabel 10 menyajikan upaya penyelamatan UMKM pada beberapa negara melalui upaya intervensi pasar tenaga kerja (Sugiri, 2020).

Otoritas pembuatan kebijakan di Cina melakukan intervensi berupa stimulus ekonomi untuk menstabilkan atau mempertahankan pertumbuhan ekonomi (Fernandes, 2020). Pasca pandemi COVID-19, bahkan tiga bulan setelah wabah, ekonomi Cina tidak akan beroperasi secara normal. UMKM menjadi kunci karena di hampir semua negara, UMKM mempekerjakan banyak tenaga produktif. Pengambilan kebijakan yang tepat untuk memulihkan perekonomian sangat menentukan, terutama berkaitan menjaga likuiditas UMKM, mendukung keluarga terdampak, reaksi dan kesiapan dunia usaha memulai kegiatan ekonominya (Fernandes, 2020). Pengambilan kebijakan juga sangat tergantung dari lamanya pengurangan aktifitas sosial atau lockdown.

Langkah kebijakan yang baik juga dicontohkan dari Arab Saudi yang mengedepankan serangkaian kebijakan terkoordinasi dengan tujuan utama melindungi manusia dan menjaga kestabilan ekonomi (Sikki, 2020). Pemerintah Arab Saudi memberikan keringanan bagi para pemilik bisnis dalam jangka waktu 3 bulan untuk menunda pembayaran PPN, Pajak Cukai, Pajak Penghasilan dan pengajuan pernyataan zakat dan pembayaran kewajiban lainnya (Sikki, 2020). Kementerian Keuangan Arab Saudi juga memberikan bantuan pembiayaan dalam bentuk pinjaman serta

pembebasan dari pengembalian pinjaman beserta biayanya sampai akhir tahun 2020 dalam inisiatif program keberlanjutan perusahaan (Sikki, 2020).

Dernmark memberikan kompensasi kerugian sebesar 75% terhadap para pelaku UMKM, yang memiliki jumlah karyawan di bawah 10 orang dan mengalami kerugian sekitar 30% atau lebih (Febrantara, 2020). Italia membangun portal digital yang disediakan tanpa biaya kepada para UMKM agar dapat tetap menjalankan roda bisnis di masa pandemi (Febrantara, 2020). Pemerintah USA merespons dengan program pinjaman lunak untuk beberapa sektor usaha, program ini memberikan uang tunai bagi mereka yang membutuhkan untuk mempertahankan pekerja, membayar sewa, dan membantu bisnis mereka hidup kembali (Baker & Judge, 2020). Pemerintah USA perlu menemukan cara-cara baru dan kreatif untuk bekerja dengan perantara yang ada, termasuk bank dan pemberi pinjaman online, yang memiliki infrastruktur dan alat yang diperlukan untuk membantu usaha kecil mendapatkan pinjaman tambahan yang mereka butuhkan untuk bertahan hidup dan berkembang (Baker & Judge, 2020). Memanfaatkan lembaga yang ada dapat meningkatkan kecepatan, skala, dan ruang lingkup respons pemerintah, semua kebijakan penting dilakukan dalam upaya mendukung bisnis kecil di USA (Baker & Judge, 2020).

Berikut hasil studi literatur yang mengkaji strategi yang diimplementasikan pelaku UMKM di Indonesia untuk bisa bertahan. Ika, et al (2020) melakukan studi

penelitian strategi manajemen bisnis pasca COVID-19. Hasil penelitian tersebut adalah para UMKM melakukan pengembangan strategi pemasaran yang tepat untuk mencapai target penjualan maupun produktivitas yang lebih baik. Perencanaan dan pengembangan produk usaha dengan harga yang terjangkau harus menarik minat konsumen. Awalil (2020) melakukan penelitian mengenai urgenisi pemanfaatan e-marketing pada keberlangsungan UMKM di Kota Pekalongan di tengah pandemi COVID-19 hasil penelitian tersebut adalah melalui peranan teknologi kegiatan usaha dan pendistribusian barang masih bisa dilakukan. Marlinah (2020) melakukan penelitian mengenai peluang dan tantangan UMKM memperkuat ekonomi nasional tahun 2020 ditengah pandemi COVID-19 hasil penelitian tersebut adalah perwujudan UMKM untuk bertahan di masa pandemi tidak hanya melalui UMKM tersebut saja, melainkan ada dorongan dari pemerintah untuk membuat UMKM tersebut dapat bertahan dan bahkan mengembangkan usahanya. Narto (2020) melakukan penelitian penguatan strategi pemasaran Puduk di tengah pandemi COVID-29 untuk meningkatkan keunggulan bersaing UMKM Kota Gresik hasil penelitian tersebut adalah wabah COVID-19 yang melanda dunia mengakibatkan beberapa sektor industri termasuk Usaha Mikro Kecil Menengah (UMKM) di kota Gresik juga mengalami dampak turunnya tingkat penjualan sehingga keuntungan yang diperoleh hanya berkisar 7% dalam kurun waktu 1 bulan. Hardilawati (2020) melakukan penelitian terhadap

Strategi Bertahan UMKM di Tengah Pandemi Covid-19 hasil penelitian tersebut adalah temuan yang lain berdasarkan Observasi, tidak semua UMKM merasakan penurunan omset penjualan dan harus menutup usahanya, ada UMKM yang masih stabil dan mengalami peningkatan omzet penjualannya karena mereka melakukan penyesuaian diri dalam hal produk dan melakukan beberapa strategi pemasaran untuk bertahan. Ada beberapa hal yang dapat dilakukan oleh UMKM termasuk memilih membuka lini produk baru atau memperbaharui sistem pemasaran mereka, karena bisnis yang mampu bertahan adalah bisnis yang responsif terhadap perubahan lingkungan mereka. Adapun beberapa hal yang bisa dilakukan oleh UMKM seperti memanfaatkan penjualan melalui e-Commerce, peningkatan kualitas layanan, digital marketing, dan customer relationship marketing. Melalui cara tersebut maka UMKM dapat memaksimalkan penjualan mereka dan dengan mengikuti protokol yang ada selama masa pandemi ini.

Kebijakan Pemulihan UMKM di Indonesia Dalam pandangan Wibowo & Handika (2017), Indonesia telah melakukan beberapa langkah dalam mengurangi efek dari pandemi Covid-19 diantaranya adalah melakukan penurunan atas BI 7-Day Reverse Repo Rate sebesar 25 bps menjadi 4.75%, suku bunga Deposit Facility sebesar 25 bps menjadi 4.00% dan suku bunga Lending Facility sebesar 25 bps menjadi 5.50%. Langkah ini diterapkan guna menstimulus pertumbuhan ekonomi domestik di tengah tertahannya

prospek pemulihan ekonomi global akibat pandemi Covid-19. Selain itu untuk menjaga agar inflasi dan stabilitas eksternal tetap terkendali serta untuk memperkuat momentum pertumbuhan ekonomi Bank Indonesia harus dapat mencermati perkembangan ekonomi global dan domestik (Nasution et al., 2020).

Terdapat lima skema dalam pemulihan koperasi dan UMKM di tengah pandemi Covid-19 yaitu: (a) pemberian bantuan sosial kepada pelaku usaha sektor UMKM yang miskin dan rentan, (b) insentif pajak bagi UMKM; (c) relaksasi dan restrukturisasi kredit bagi UMKM; (d) perluasan pembiayaan modal kerja UMKM; (d) menempatkan kementerian, BUMN dan Pemerintah Daerah sebagai penyangga produk UMKM; dan (e) pelatihan secara e-learning (Sugiri, 2020).

Berdasarkan berbagai uraian tentang kondisi pengembangannya UMKM, maka berikut ini ditampilkan hasil analisis SWOT serta alternative strategi yang perlu dilakukan dalam rangka membantu mengembangkan UMKM di Kabupaten Bogor. Adapun sisi internal dari UMKM ini dikategorikan kepada kekuatan (Strength) dan kelemahan (Weakness). Kemudian sisi eksternal yang mempengaruhi UMKM dikelompokkan menjadi peluang (Opportunity) dan ancaman (Treath). Keempat kelompok tersebut ditampilkan dalam Tabel SWOT berikut.

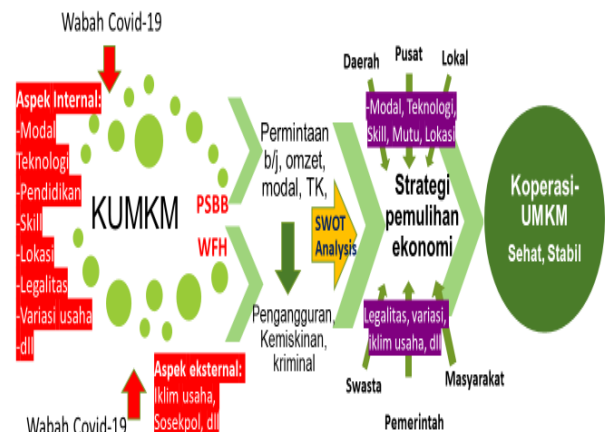
Selanjutnya dari factor internal dan eksternal tersebut dirumuskan berbagai strategi, seperti strategi S-O, Strategi W-O, Strategi S-T, dan Strategi W-T. Strategi S-O adalah

bagaimana memanfaatkan kekuatan pada internal UMKM dan meraih peluang eksternal yang ada. Beberapa alternatif Strategi S-O yang memungkinkan antara lain: 1) Pelaku UMKM perlu didorong untuk meningkatkan volume usahanya karena peluang pasar masih terbuka lebar. Hal ini didukung oleh jumlah penduduk Kabupaten Bogor yang relative besar dan adanya kota-kota di sekitar Bogor sampai ke Jakarta yang juga memiliki jumlah penduduk yang besar. 2) Dukungan pemasaran produk melalui Kemitraan Usaha dengan Pasar Institusi dan penyediaan lokasi pemasaran bersama. Pelaku UMKM dapat mencari berbagai cara dan Teknik dalam memasarkan produknya, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Bila hasil analisis SWOT tentang bisnis koperasi dan UMKM di atas diformulasi lebih lanjut dan disandingkan dengan strategi yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Bogor, maka berikut ini dapat ditampilkan hasilnya. Dampak terberat yang dirasakan oleh koperasi-UMKM dari pandemic serta dikeluarkannya kebijakan PSBB, social distancing serta WFH oleh pemerintah adalah omzet usaha yang turun drastic, modal usaha yang semakin menipis, pemasaran yang terhambat, penyediaan bahan baku yang terganggu, dan tenaga kerja yang berkurang.

Kondisi negatif ini makin diperburuk oleh ketidak siapan internal koperasi dan UMKM, seperti SDM yang lemah, modal yang terbatas, kualitas produk yang rendah, teknologi produksi dan pemasaran yang terbatas, lokasi dan system pemasaran yang terbatas,

perijinan usaha yang tidak lengkap, dan lainnya.



Gambar 1 Kebijakan Pengembangan UMKM dalam Masa Pandemic Covid-19 di Kabupaten Bogor

Agar bisnis koperasi dan UMKM dapat kembali pulih, maka berbagai pihak seperti swasta, masyarakat dan pemerintah serta level pusat, provinsi/kabupaten serta local perlu bahu-membahu mendorong pemulihan tersebut. Sejak ditetapkannya sebagai pandemi, pertambahan kasus positif di Indonesia maupun Jawa Barat menunjukkan perkembangan meningkat, dengan terjadinya peningkatan jumlah kasus positif dan persebaran semakin meluas di Jawa Barat. Hal ini memberikan dampak yang sangat besar terhadap berbagai sektor termasuk dalam pelaksanaan dan penganggaran pembangunan daerah Tahun 2020. Kebijakan refocusing dan realokasi anggaran di Tahun 2020 sangat berpengaruh terhadap target capaian kinerja pemerintah daerah. Telah dilakukan beberapa kali pergeseran anggaran untuk memenuhi kebutuhan penanganan Covid-19. Oleh sebab itu dalam Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Jawa Barat

Tahun 2021, rehabilitasi dan rekonstruksi dampak COVID-19 merupakan tambahan prioritas pembangunan Jawa Barat dari 9 (sembilan) prioritas lainnya yang sudah ditetapkan dalam RPJMD. Penambahan prioritas ini ditegaskan kembali dalam acara Musyawarah Perencanaan Pembangunan Provinsi Jawa Barat Tahun 2020 yang merupakan momentum penting dalam perencanaan pembangunan Tahun 2021 di tengah pandemi COVID-19, dimana ada 2 (dua) agenda penting yaitu pemulihan ekonomi pasca pandemi COVID-19 dan mendukung tahapan tahun kedua pencapaian visi misi dalam RPJMD Tahun 2018-2023 yaitu terwujudnya Jabar Juara Lahir dan Batin melalui inovasi dan kolaborasi. Tentunya kebijakan RPJMD Jawa Barat tersebut berkaitan langsung dengan RPJMD di Kabupaten Bogor.

Pelaksanaan upaya pemulihan ekonomi di Jawa Barat terus digalakkan oleh Pemerintah Provinsi Jawa Barat melalui beragam program pemulihan ekonomi yang memperhitungkan potensi yang dimiliki, penerapan protokol kesehatan dalam berbagai bidang usaha, serta pelayanan publik sebagai salah satu wujud dari implementasi "*new normal*" atau adaptasi kebiasaan baru (AKB). Protokol kesehatan dilaksanakan sesuai dengan tingkatan (level) dan klasifikasi resiko kesehatan serta dampak pada perekonomian.

Komite Percepatan Pembangunan Strategis Kabupaten Bogor, menekankan bahwa penanganan pandemi COVID-19 di wilayahnya kini terfokus pada lima

hal. Hal pertama, yaitu menjaga masyarakat dari darurat COVID-19, yakni melindungi mereka dari ancaman virus yang dapat menjangkit kapanpun. Kedua, menangani masyarakat yang sehat dan terkonfirmasi positif. Ketiga, menangani masyarakat yang terkonfirmasi positif dan bergejala. Keempat, menangani masyarakat yang terkonfirmasi positif dan meninggal dunia. Kelima, menanggulangi dampak pandemi. Pemerintah Kabupaten Bogor juga sudah melakukan upaya-upaya pencegahan dengan berbagai kebijakan seperti pendisiplinan prokes, vaksinasi, serta pelayanan di crisis center dan pusat isolasi.

Kebijakan pencegahan dan percepatan penanganan Covid-19 dengan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), pembatasan mobilitas dan aktivitas, Work From Home (WFH), sekolah dari rumah, dan sebagainya, telah berdampak pada peningkatan jumlah pengangguran dalam jumlah yang besar. Gelombang Penghentian Hubungan Kerja (PHK) semakin merebak di sejumlah sektor, mulai dari sektor manufaktur, pariwisata, transportasi, perdagangan, konstruksi, dan lainnya. Selain itu, ada pula sebagian perusahaan yang saat ini hanya mampu membayar separuh dari gaji karyawannya. Provinsi Jawa Barat termasuk wilayah yang sangat terdampak akibat pandemi Covid-19 ini. Berdasarkan data sampai dengan akhir April 2020 terdapat sejumlah 1.674 perusahaan yang terkena dampak yang menyebabkan pekerja

dirumahkan atau di-PHK sebanyak 69.260 pekerja.

Dampak dari COVID-19 juga mempengaruhi penganggaran APBD Tahun 2020 yang sudah mengalami perubahan. Kebijakan anggaran untuk stimulus penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dalam bentuk *refocusing* APBD Tahun 2020, selain tetap melaksanakan kebijakan yang telah ada, juga melaksanakan kebijakan pemulihan ekonomi daerah yang diarahkan pada pemberian bantuan permodalan bagi UMKM dan pekerja yang terdampak PHK, pemberian insentif terhadap permasalahan sektor primer yang muncul akibat terganggunya sektor sekunder. Kemudian pengendalian distribusi pangan, pengembangan usaha pangan masyarakat dan peningkatan pengelolaan pasca panen, penguatan cadangan pangan daerah, penyediaan pelayanan sarana dan prasarana pertanian berupa penyediaan benih, bibit dan peningkatan stimulus pupuk dan obat-obatan, peningkatan produksi pertanian melalui optimalisasi produksi UPT dan balai benih, memberikan bantuan kepada kelompok-kelompok usaha budidaya pertanian dan perikanan, membantu pemasaran produk pertanian dan UMKM dengan model online, serta melaksanakan model pembangunan padat karya, terutama dalam pembangunan sarana dan prasarana di desa.

Adapun gambaran kinerja keuangan daerah, untuk target pendapatan daerah setelah perubahan anggaran 2020 sebesar Rp. 7.796.175.823.514 dengan realisasi sampai dengan 31 Desember 2020 sebesar Rp.

7.687.179.717.004 atau 98,60%. Target belanja daerah pada APBD perubahan tahun 2020, Rp. 8.901.471.622.514 terealisasi sebesar Rp. 8.405.493.580.579 atau 94,43%. Untuk target pembiayaan sebesar Rp. 1.105.295.799.000 terealisasi sebesar Rp. 1.105.295.799.163,97 atau 100%. Selanjutnya, jumlah program/kegiatan tahun 2020 terdiri atas 436 program dan 5.682 kegiatan dengan capaian belanja langsung sebesar 92,49%, tingkat capaian kinerja program atau outcome sebesar 93,54% dan tingkat capaian indikator kinerja output sebesar 94,23%. Kebijakan anggaran untuk stimulus penanganan COVID-19 yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bogor dalam bentuk *refocusing* APBD Tahun 2020

IV. PENUTUP

Pandemi Covid-19 telah menyebabkan dampak yang luar biasa terhadap kesehatan dan ekonomi Indonesia dan khususnya di Kabupaten Bogor. Untuk mengatasi dampak pandemic ini menuju kepada pemulihan ekonomi secara umum, maka artinya bagaimana menggerakkan usaha UMKM tersebut kembali seperti semula atau lebih berkembang lagi. Di tingkat pusat pemerintah mengeluarkan kebijakan fiskal berupa pengalokasian APBN untuk menangani Covid-19 (mendorong konsumsi dan peningkatan aktivitas dunia usaha termasuk UMKM), menjaga stabilitas ekonomi dan moneter. Peningkatan konsumsi dilakukan dengan BLT, Kartu pra kerja, pembebasan listrik dan lainnya. Dukungan terhadap UMKM antara lain subsidi bunga KUR

dan Ultra Mikro, penundaan angsuran kredit (relaksasi), penempatan dana untuk UMKM dan perbankan, dukungan pembayaran terhadap LPBD, pemberian insentif pajak, Banpres Produktif yang mencapai 112 T. Pemerintah juga mendorong perkembangan sektor UMKM melalui berbagai pelatihan yang diberikan dalam program Kartu Prakerja. Di tingkat kabupaten, strategi yang perlu dilakukan antara lain akselerasi dan optimalisasi bantuan langsung ke masyarakat, baik bantuan sembako maupun BLT. Selain itu perlu diberikan kemudahan akses permodalan dengan bunga yang lebih ringan. Strategi lain adalah pengembangan ekonomi inovatif desa-kota pasca pandemi.

Berdasarkan kesimpulan ada beberapa rekomendasi yaitu: 1) Mengalokasikan anggaran yang memadai untuk penanganan COVID-19 dan terkait kesehatan serta penanganan dampak ekonomi 2) Penegakan disiplin protokol Covid-19, tetap memprioritaskan perlindungan sosial terutama terhadap rumah tangga miskin dan rentan (PKH) serta sektor informal, perluasan Kartu Sembako, dan Kartu Pra-Kerja 3) Evaluasi intensif terhadap sasaran, kualitas, akuntabilitas, transparansi, dan efektifitas penyaluran dan pemanfaatan hibah dan bansos akan memberikan *feedback* yang signifikan bagi perbaikan pengelolaan skema hibah dan bansos 4) Penguatan UMKM dengan menumbuhkan kewirausahaan baru (*start up*), digitalisasi UMKM, fasilitasi UMKM dengan lembaga

keuangan, serta melakukan penguatan industri pariwisata. Berbagai kegiatan pembantuan koperasi-UMKM tersebut dilakukan dengan gratis atau tanpa pengenaan biaya-biaya tambahan.

DAFTAR PUSTAKA

- Alfrian G R, Pitaloka E. 2020. Strategi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) Bertahan pada Kondisi Pandemi Covid-19 di Indonesia. Seminar Nasional Terapan Riset Inovatif (SENTRINOV) Ke-6 *ISAS Publishing Series: Social and Humanities* Vol. 6 No. 2 (2020) E-ISSN: 2621-9794, P-ISSN: 2477-2097
- Bahtiar, R. A., & Saragih, J. P. (2020). Dampak Covid-19 terhadap perlambatan ekonomi sektor UMKM. *Jurnal Bidang Ekonomi Dan Kebijakan Publik*, (6), 19– 24.
- Baker, T., & Judge, K. (2020). How to Help Small Businesses Survive COVID-19. Columbia Law and Economics Working Paper(620). Retrieved from <http://dx.doi.org/10.2139/ssrn.3571460>
- BNPB. (2020). Infografis Covid-19. Retrieved from <https://loker.bnpb.go.id/s/GugusTugasCovid19?path=%2FInfografis%20Data>

- Febrantara, D. (2020). Bagaimana Penanganan UKM di Berbagai Negara Saat Ada Pandemi Covid-19? DDTC Fiscal Research. Retrieved from <https://drive.google.com/drive/folders/1MY31IOC3gWqEgzNkuJzqJnB9PV6qA2D>
- Gentilini, U., Almenfi, M., Orton, I., & Dale, P. (2020). Social protection and jobs responses to COVID-19: a real-time review of country measures. Live Document. World Bank, Washington, DC. <http://www.ugogentilini.net/wp-content/uploads/2020/03/global-review-of-social-protection-responsestoCOVID-19-2.pdf>. Retrieved from <http://documents.worldbank.org/curated/en/377151587420790624/pdf/Social-Protection-and-Jobs-Responses-to-COVID-19-A-Real-Time-Review-of-Country-Measures-April-3-2020.pdf>
- Kemenkop-UKM. (2018). Perkembangan Data Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM) dan Usaha Besar (UB).
- Laila, S. N. (2021). Dampak Covid-19 terhadap Usaha Mikro, Kecil dan Menengah. Jurnal Ekonomi & Ekonomi Syariah Vol 4 No 1, Januari 2021, <https://doi.org/10.36778/jesya.v4i1.278>.
- Pakpahan, A. K. (2020). COVID-19 dan Implikasi Bagi Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah. Jurnal Ilmiah Hubungan Internasional, 59-64.
- Sikki, K. L. (2020). Kebijakan Ekonomi Arab Saudi Dalam Mengantisipasi Pandemi Covid-19. Journal of Islamic Civilization, 2(1), 8-16.
- Wordometer. (2020). Covid-19 Coronavirus Cases. Retrieved from <https://www.worldometers.info/coronavirus/>